

IMPLEMENTASI APLIKASI BHABINKAMTIBMAS OPERASIONAL SISTEM (BOS V2) DI LINGKUNGAN HUKUM POLRES HULU SUNGAI UTARA

Musaropah¹, M.Husaini², Reno Affrian³

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

e-mail: musaropah125@gmail.com

ABSTRAK

Implementasi Aplikasi Bhabinkamtibmas Operasional Sistem (BOS V2) di Lingkungan Hukum Polres Hulu Sungai Utara terdapat permasalahan, diantaranya Aplikasi Bhabinkamtibnas Operasional Sistem (BOS V2) belum bisa mengcover semua kegiatan pelaporan, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan banyak anggota bhabinkamtibmas yang tidak memahami pengoperasian aplikasi. Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui Implementasi Aplikasi Bhabinkamtibmas Operasional Sistem (BOSV2) dan faktor yang mempengaruhinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi aplikasi bhabinkamtibmas operasional sistem (BOS V2) di Lingkungan Hukum Polres Hulu Sungai Utara secara umum cukup baik. (2) faktor pendukung, sebagai bukti kerja para anggota Bhabinkamtibmas dan mempermudah anggota bhabinkamtibmas dalam memberikan pembinaan. (3) faktor penghambat, jaringan yang sering mengalami gangguan dan server sering eror.

Kata Kunci: Implementasi, Aplikasi BOS V2, Polres Hulu Sungai Utara

ABSTRACT

The implementation of the Bhabinkamtibmas Operational System (BOS V2) Application in the Legal Environment of the North Hulu Sungai Police has problems, including the Bhabinkamtibnas Operational System (BOS V2) Application not being able to cover all reporting activities, lack of outreach to the public and many Bhabinkamtibmas members not understanding the operation of the application. The research objective is to determine the implementation of the Bhabinkamtibmas Operational System (BOSV2) application and the factors that influence it. The research results show that (1) The research results show that the implementation of the Bhabinkamtibmas operational system (BOS V2) application in the Legal Environment of the North Hulu Sungai Police is generally quite good. (2) supporting factors, as proof of the work of Bhabinkamtibmas members and to make it easier for Bhabinkamtibmas members to provide guidance. (3) inhibiting factors, the network often experiences disruptions and the server often experiences errors.

Keyword: Implementation, Application of BOS, Hulu Sungai Utara Police

PENDAHULUAN

Tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sudah lama menjadi keinginan banyak kalangan di Indonesia. Dalam mengembangkan praktik *good governance*, pemerintah perlu mengambil dan menggunakan strategi yang tepat. Luasnya cakupan persoalan yang dihadapi, kompleksitas dari setiap persoalan yang ada, serta keterbatasan sumber daya dan kapasitas pemerintah dan juga non-pemerintah untuk melakukan pembaharuan praktik *governance*, mengharuskan pemerintah mengambil pilihan yang strategis dalam memulai pengembangan praktik *good governance*. Salah satu pilihan strategis untuk mengembangkan *good governance* di Indonesia adalah melalui pengembangan penyelenggaraan pelayanan publik yang mencirikan nilai-nilai yang selama ini melekat pada *good governance*.

Sumber daya itu adalah Sumber Daya Manusia (SDM). SDM merupakan sumber daya yang memegang peran sentral di perusahaan. Hal ini karena peralatan secanggih apapun tidak akan berarti tanpa adanya SDM yang mampu dimanfaatkan demi mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Mengingat pentingnya peran SDM, maka merupakan harapan setiap perusahaan memiliki manusia-manusia berkualitas yang akan memudahkan mereka dalam mencapai tujuannya. Dasarnya setiap instansi pemerintah, bukan saja mengharapkan pegawai yang mampu, cakap, dan terampil tetapi yang terpenting mereka mau bekerja giat dan berkeinginan mencapai hasil kerja yang optimal. Untuk itu, pimpinan hendaknya berusaha agar pegawai mempunyai motivasi tinggi untuk melaksanakan tugas atau pekerjaannya. Disinilah pentingnya peranan motivasi untuk mendorong semangat kerja pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya.

Indonesia Implementasi diartikan sebagai kegiatan pelaksanaan atas apa yang telah diputuskan dan disepakati sebelumnya. Proses implementasi memiliki posisi yang sangat penting dalam kebijakan publik. Hal ini dikarenakan tanpa adanya implementasi yang baik maka kebijakan yang telah ditetapkan hanya akan sia-sia dan tidak berjalan secara baik dan benar. Untuk itu dalam kebijakan publik pengimplementasian kebijakan sangatlah penting untuk dapat mencapai tujuan ditetapkannya suatu kebijakan publik.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan suatu intitusi Negara yang bertugas memastikan keamanan dan kenyamanan kehidupan masyarakat. Polri mempunyai misi penting dalam mengemban tugasnya. Dalam suasana reformasi ini, Polri adalah intitusi publik dalam penegakan hukum dan penyelenggaraan keamanan ketertiban masyarakat sehingga sebelum mendisiplinkan masyarakat dalam menegakkan hukum dan penyelenggaraan keamanan ketertiban masyarakat sehingga polri dituntut untuk berubah mendisiplinkan diri sendiri. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang secara teoritis melekat sebagai tugas dan tanggung jawab pemerintah atau negara, sehingga penyelenggaraan kepolisian tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan, karena itu penyelenggaraan kepolisian harus bertumpu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai landasan hukum tidak tertulis dalam penyelenggaraan kepolisian bertumpu pada konsep kepolisian yang baik yang dijabarkan dalam rumusan standar kepolisian yang baik. Indikator kepolisian yang baik apabila dalam penyelenggaraan kepolisian bebas dari tindakan mal-administrasi.

Polres Hulu Sungai Utara harus menampilkan postur pelayanan yang baik untuk mendapatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Polres harus bisa memahami bahwa peran serta masyarakat adalah kunci keberhasilan tugas Polres yang paling tepat dalam rangka pendakatan sekaligus mendapatkan partisipasi masyarakat akan tergerak jika dilakukan melalui organisasi yang sudah dikenal, memberi pelayanan langsung kepada masyarakat luas, upaya yang dilakukan memenuhi kepentingan masyarakat serta terdapatnya kontrol dari masyarakat. Bhabinkamtibmas adalah Bintara Pembina Keamanan dan ketertiban masyarakat yang berperan aktif dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta langsung bersentuhan dengan aktifitas masyarakat. Kamtibmas merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat dan pemerintah, termasuk di dalamnya adalah Kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Sedangkan masyarakat merupakan sekelompok warga (laki-laki dan perempuan) atau komunitas yang berbeda di dalam suatu wilayah kecil yang jelas batas-batasnya. Batas wilayah komunitas dapat berbentuk RT, RW, desa, kelurahan, dan lain sebagainya. Bhabinkamtibmas yang bertujuan untuk mengupayakan terwujudnya situasi

Kamtibmas yang mantap dan dinamis akan berpengaruh terhadap masyarakat (Kaluara, 2014). Binmas Online System Versi 2.0 (BOS V2) untuk meningkatkan layanan kepolisian bagi masyarakat dan juga internal polisi. e cara internal aplikasi BOS V2 dapat membuat laporan terkait dengan kegiatan-kegiatan Bhabinkamtibmas yang ada di sektor polisi terdepan di tingkat desa. Dengan aplikasi tersebut, seluruh informasi yang ada bisa terlapor ke pusat, kemudian disatukan dalam satu sistem *big data*. Dari data tersebut, akan bisa memprediksi dengan memanfaatkan *artificial intelligence* (intelijen buatan) sehingga Polri bisa melakukan perkiraan-perkiraan terkait dengan masalah gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi di tengah masyarakat. plikasi BOS V2 juga bisa untuk interaksi bagi masyarakat yang memerlukan informasi ataupun pelayanan-pelayanan kepolisian. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat masyarakat bisa melapor. Laporan yang ada di aplikasi BOS V2, akan direspons sehingga masyarakat bisa mendapatkan apa yang diperlukan terkait dengan pelayanan kopolisian yang ada (Cahyo, 2021).

Adapun hasil observasi dilapangan, penulis menemukan masalah sebagai berikut :

1. Aplikasi Bhabinkamtibmas Operasional Sistem (BOS V2) belum bisa mengcover semua kegiatan pelaporan Bhabinkamtibmas. Aplikasi tersebut hanya bisa pada kegiatan *Door To Door* saja belum bisa mengcover kegiatan harian ataupun bulanan.
2. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga sebagian masyarakat tidak mengetahui aplikasi Bhabinkamtibmas Operasional Sistem (BOS V2).
3. Banyaknya Bhabinkamtibmas yang masih tidak memahami pengoperasian aplikasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi (Sugiyono, 2016). Sumber data diambil melalui penarikan sampel secara *purposive sampling* berjumlah 13 orang. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik meliputi kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Uji kridibilitas data dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan penekunan dalam penelitian, triangulasi, analisis kasus negatif menggunakan bahan referensi dan *member check* (Abdussamad, 2021).

Penelitian ini dilakukan pada Polres Hulu Sungai Utara, Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas), Jalan Muhajirin No. 02 Kelurahan Murung Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Penelitian ini tergolong tipe penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan objek dan fenomena yang diteliti. Ada berbagai metode yang dapat digunakan, metode yang akan dipilih peneliti harus sesuai dan berhubungan dengan prosedur Implementasi Aplikasi Bhabinkamtibmas Operasional Sistem (BOS V2) di Lingkungan Hukum Polres Hulu Sungai Utara.

Metode pengumpulan dan menggunakan meotode teknik: wawancara mendalam dilakukan dengan cara Purposive Samping (pengambilan sampel secara sengaja) dengan para informan, observasi lapangan berlangsung, dokumentasi berupa foto-foto penelitian dalam kegiatan penelitian saat dilapangan. Teknik analisis data dengan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Aplikasi Bhabinkamtibmas Operasional Sistem (BOS V2) di Lingkungan Hukum Polres Hulu Sungai Utara masih tergolong cukup baik dapat dilihat dari: **Pertama**, dari sub variabel komunikasi dengan indikator transmisi (pemberitahuan program) sudah cukup baik. **Kedua**, dari sub komunikasi dengan indikator kejelasan masih cukup baik. **Ketiga**, dari sub variabel komunikasi dengan indikator konsistensi sudah baik. **Keempat**, dari sub variabel sumber daya dengan pegawai/staff juga sudah baik. **Kelima**, dari sub variabel sumber daya dengan indikator informasi dapat tergolong sudah baik. **Keenam**, dari sub variabel sumber daya dengan indikator wewenang dapat dikatakan kurang baik disebabkan tidak semua anggota Bhabinkamtibmas yang melaporkan kegiatannya ke dalam aplikasi Bhabinkamtibmas Operasional Sistem (BOS V2). **Ketujuh**, dari sub variabel sumber daya dengan indikator fasilitas dapat dikatakan kurang baik. **Kedelapan**, dari sub variabel disposisi dengan indikator pengangkatan birokrasi dapat dikatakan baik. **Kesembilan**, dari sub variabel disposisi dengan indikator insentif dikatakan baik karena. **Kesepuluh**, dari sub variabel struktur birokrasi dengan indikator *Standard Operating Procedure* (SOP) dapat tergolong cukup baik. **Kesebelas**, dari sub variabel struktur birokrasi dengan indikator fragmentasi (koordinasi antar pelaksana kebijakan) dapat dikatakan baik.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Aplikasi Bhabinkamtibmas Operasional Sistem (BOS V2) di Lingkungan Hukum Polres Hulu Sungai Utara dibagi menjadi dua yakni faktor penghambat dan faktor pendorong, sebagai berikut:
Faktor **Penghambat** yaitu, jaringan yang sering mengalami gangguan dan server sering eror. Faktor **Pendorong** yaitu, sebagai Bukti Kerja Para Anggota Bhabinkamtibmas dan mempermudah anggota Bhabinkamtibmas dalam memberikan pembinaan.

Melalui analisis dengan George Edward III (1980,1) dalam Nuryanti Mustari (Nuryanti Mustari, 2015), maka faktor yang mempengaruhi Implementasi Aplikasi Bhabinkamtibmas Operasional Sistem (BOS V2) di Lingkungan Hukum Polres Hulu Sungai Utara meliputi:

1. Faktor Penghambat
Faktor yang menghambat berjalannya Aplikasi Bhabinkamtibmas Operasional Sistem (BOS V2) di Lingkungan Hukum Polres Hulu Sungai Utara.
 - a. Jaringan yang Sering Mengalami Gangguan
 - b. Server Sering Error
2. Faktor Pendukung
Faktor yang mendukung berjalannya Aplikasi Bhabinkamtibmas Operasional Sistem (BOS V2) di Lingkungan Hukum Polres Hulu Sungai Utara.
 - a. Sebagai Bukti Kerja Para Anggota Bhabinkamtibmas
 - b. Mempermudah Anggota Bhabinkamtibmas dalam Memberikan Pembinaan

SIMPULAN

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian tersebut maka perlu dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Kepala Polisi Resort Hulu Sungai Utara, mengusulkan kepada Polri untuk peningkatan akses penggunaan aplikasi Bhabinkamtibmas Operasional Sistem (BOS V2).
2. Kasat Binmas Polres Hulu Sungai Utara, meningkatkan pengawasan kepada seluruh anggota Bhabinkamtibmas dalam pelaporan kegiatan ke dalam aplikasi Bhabinkamtibmas Operasional Sistem (BOS V2).
3. Para anggota Bhabinkamtibmas Polres Hulu Sungai Utara meningkatkan kesadaran dan kemampuan untuk mengoptimalkan penggunaan aplikasi Bhabinkamtibmas Operasional Sistem (BOS V2).
4. Masyarakat meningkatkan partisipasi dalam suksesnya implemntasi aplikasi Bhabinkamtibmas Operasional Sistem (BOS V2) di Lingkungan Hukum Polres Hulu Sungai Utara.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussamad (2021) *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV Syakir Media Press.

Affrian, R., Sos, S. and AP, M. (2023) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. CV. Bintang Semesta Media.

Cahyo, K.N. (2021) *Pengenalan Binmas Online System Versi 2*.

Kaluara, H. (2014) *Pintar Bhabinkamtibmas*. Jakarta: Internatonal Organization for Migration (IOM) Indonesia.

Nuryanti Mustari (2015) *Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: LeutikaPrio.

Saputra, T. *et al.* (2023) 'Bibliometric Studies and Public Administration Research Potential on Stunting Problems', *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 6(2), pp. 197–211.

Setiawan, I., Sukristyanto, A. and Ibnu Rochim, A. (2021) 'The Implementation of Law Number 16 of 2019 a Case Study of Early Marriage Prevention in Hulu Sungai Utara Regency Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 117.

Sugiyono (2016) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.